
Peran ALKI II dalam Mendukung Keamanan Ibu Kota Nusantara: Tinjauan Strategis dan Pertahanan

Yudha Himawan

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL); Indonesia
correspondence e-mail*, 7nov84@gmail.com

Submitted:

Revised: 2025/01/01;

Accepted: 2025/02/11; Published: 2024/04/15

Abstract

ALKI II (Indonesian Archipelago Sea Lane II) is a strategic sea lane connecting the Indian Ocean with the South China Sea and is very important in supporting the security and stability of the newly built Indonesian Capital City (IKN) in East Kalimantan. However, this region faces various challenges such as illegal maritime activities, limited surveillance technology, and geopolitical dynamics due to foreign military activities. The purpose of this study is to analyze the role of ALKI II in supporting the security of the Indonesian Capital City by identifying the challenges and opportunities in the region. This study uses a qualitative method, with a descriptive analytical approach to relevant secondary data. Based on the results of the study, it was found that although ALKI II faces threats in the form of piracy, smuggling, illegal fishing, and geopolitical influence, opportunities for international cooperation through joint military exercises and improvements in surveillance technology offer significant solutions. In addition, environmental problems such as marine pollution and ecosystem degradation also affect security stability in this region. In conclusion, strengthening international cooperation, modernizing defense technology, and strict environmental policies are key to ensuring that ALKI II can effectively support the security of the Indonesian Capital City.

Keywords

Role, ALKI II, Security, Capital City of the Archipelago



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta dua benua, Asia dan Australia.¹ Posisi geografis ini menjadikan Indonesia memiliki peran strategis dalam lalu lintas laut internasional. Salah satu aspek penting dari hal ini adalah adanya tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI I, ALKI II, dan ALKI III, yang diakui dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 sebagai jalur pelayaran

¹Nilasari, S. R., Marzaman, A. P., & Kurniasari, R. (2024). Doktrin Poros Maritim Dunia dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika di Jalur ALKI II. *Journal of Political Issues*, 6(1), 20-31.

internasional. Di antara ketiga jalur tersebut, ALKI II memiliki peran khusus dalam mendukung keamanan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

ALKI II merupakan salah satu jalur laut strategis yang melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Jawa hingga menuju Samudra Hindia. Jalur ini digunakan oleh kapal-kapal asing untuk melewati wilayah Indonesia tanpa harus berhenti di pelabuhan-pelabuhan lokal, sesuai dengan hak lintas damai yang diatur dalam UNCLOS. ALKI II menghubungkan Laut Sulawesi di utara dengan Laut Jawa di selatan, dan dari sana, kapal-kapal bisa melanjutkan perjalanan menuju Samudra Hindia atau ke berbagai pelabuhan di Asia Tenggara dan sekitarnya.²

Peran strategis ALKI II bukan hanya dari segi ekonomi atau lalu lintas perdagangan, tetapi juga dalam keamanan regional dan global. Dengan ALKI II, kapal-kapal dari berbagai negara, termasuk kapal militer, memiliki akses yang legal dan diatur dengan baik untuk melintasi wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memastikan bahwa jalur ini tetap aman dan terlindungi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.³

Ada beberapa jenis ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan ALKI II, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Ancaman terorisme maritim merupakan salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian. Perairan Indonesia, termasuk wilayah ALKI II, dapat menjadi sasaran atau jalur pergerakan bagi kelompok-kelompok teroris yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara. Kelompok-kelompok seperti Abu Sayyaf dan teroris lintas batas seringkali memanfaatkan kelemahan pengawasan di laut untuk melakukan serangan, pembajakan, atau penculikan. Oleh karena itu, peran ALKI II dalam mendukung keamanan adalah dengan memperketat pengawasan di jalur tersebut untuk mencegah aktivitas terorisme.⁴

Ancaman pembajakan laut dan perompakan juga menjadi perhatian utama. Meskipun kasus-kasus perompakan di perairan Indonesia telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, ancaman ini masih ada dan bisa menimbulkan kerugian besar, baik dari segi ekonomi maupun keamanan.⁵ Pembajakan yang terjadi di jalur internasional seperti ALKI II tidak hanya merugikan

²Dotulung, A. M. (2020). Fungsi Radar Surveillance IMSS dalam Mendukung Pengamanan Pelayaran di Selat Sunda (ALKI I). *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 8(1).

³Fitriyanto, A., Darmawan, W. B., & Djuyandi, Y. (2022). Kerjasama Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia Ii:(Studi Kasus Sinergi Bakamla, TNI Dan POLAIRUD). *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1), 1–15.

⁴Sukoco, S. (2022). PERAN KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA (KORPOLAIRUD) DALAM MENJAGA KEAMANAN DI WILAYAH SELAT SUNDA. *Strategi Pertahanan Udara*, 8(2).

⁵Jayamahe, J. J., Luther, M., & Panjaitan, M. B. (2023). PERAN LANTAMAL VIII MANADO GUNA

Indonesia, tetapi juga kapal-kapal asing yang melintasi wilayah tersebut. Keamanan di ALKI II harus ditingkatkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembajakan, terutama di titik-titik rawan seperti Selat Makassar yang sering menjadi jalur padat.⁶

Penyelundupan narkoba dan perdagangan manusia melalui jalur laut menjadi masalah yang serius. ALKI II seringkali digunakan oleh sindikat internasional untuk menyelundupkan barang-barang ilegal ke berbagai negara. Posisi strategis Indonesia yang berada di antara dua samudra membuatnya menjadi titik transit yang ideal bagi aktivitas penyelundupan. Untuk mendukung keamanan di ALKI II, diperlukan koordinasi yang kuat antara aparat keamanan laut, seperti TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta instansi lain yang berwenang dalam pengawasan perairan. Kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga juga penting untuk memutus jalur penyelundupan yang memanfaatkan wilayah perairan Indonesia (Suryawan et al., 2021).⁷

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah strategis yang melibatkan berbagai instansi, baik di tingkat nasional maupun regional. Salah satu langkah penting adalah peningkatan patroli laut yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dan Bakamla. Patroli ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal-kapal yang melintasi ALKI II mematuhi peraturan yang ada, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum di perairan Indonesia. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan ancaman seperti perompakan, terorisme, dan penyelundupan dapat ditekan.⁸

Pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi canggih untuk meningkatkan pengawasan di ALKI II. Penggunaan radar maritim, drone, dan sistem pemantauan satelit merupakan langkah yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman di jalur pelayaran. Teknologi ini memungkinkan Indonesia untuk memantau aktivitas di

MENJAGA KEAMANAN LAUT DAN MENDUKUNG TUGAS TNI AL. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 11(3), 227–248.

⁶Kharish, L., Syahtaria, I., Sianturi, D., Prakoso, L. Y., Saragih, H. J. R., & Bangun, E. (2022). Strategi Gelar Kekuatan TNI Angkatan Laut dalam Mengatasi Pelanggaran di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia II Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Perairan dalam Rangka Mendukung Operasi Militer Selain Perang (Omsp). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2849–2858.

⁷Suryawan, I. G. P., Ladjide, S., & Riyadi, S. F. (2021). Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dalam Perwujudan Good Order At Sea: Studi Kasus Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Jurnal Selat*, 8(2), 149–158.

⁸Herlambang Suryo Putro, S. (2022). Peran Tni AL Dalam Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum Dan Keselamatan Di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara Dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 10(2), 118–131.

ALKI II secara real-time, sehingga respons terhadap insiden yang mencurigakan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif.⁹

Kerjasama internasional juga menjadi kunci penting dalam menjaga keamanan di ALKI II. Sebagai bagian dari jalur pelayaran internasional, ALKI II dilalui oleh kapal-kapal dari berbagai negara, sehingga penting untuk membangun hubungan yang baik dengan negara-negara lain, terutama yang berada di sekitar kawasan Asia Tenggara. Indonesia telah menjalin kerjasama dengan beberapa negara tetangga dalam hal pertukaran informasi intelijen, patroli gabungan, serta latihan militer bersama untuk menghadapi ancaman keamanan di laut. Kerjasama ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas keamanan regional.¹⁰

Salah satu contoh penting dari kerjasama internasional ini adalah Operasi Patroli Terkoordinasi yang dilakukan oleh Indonesia bersama Malaysia dan Filipina di wilayah Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Operasi ini bertujuan untuk menekan aktivitas kelompok teroris dan perompak yang beroperasi di perairan tersebut, yang juga meliputi sebagian wilayah ALKI II. Melalui operasi ini, ketiga negara dapat berbagi informasi dan melakukan tindakan bersama untuk menjaga keamanan maritim di kawasan.¹¹

Selain peran pemerintah dan aparat keamanan, masyarakat pesisir serta sektor swasta juga memiliki kontribusi yang tidak kalah penting dalam mendukung keamanan di ALKI II. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perairan, seperti nelayan dan komunitas pesisir, seringkali memiliki pengetahuan lokal yang sangat berguna dalam mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan di laut. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara aktif melalui program-program seperti Sistem Keamanan Laut Berbasis Komunitas (Community-Based Maritime Security). Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi mata dan telinga bagi aparat keamanan dalam menjaga perairan di sekitar ALKI II.¹²

⁹Kharish, L., Syahtaria, I., Sianturi, D., Prakoso, L. Y., Saragih, H. J. R., & Bangun, E. (2022). Strategi Gelar Kekuatan TNI Angkatan Laut dalam Mengatasi Pelanggaran di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia II Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Perairan dalam Rangka Mendukung Operasi Militer Selain Perang (Omsp). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2849–2858.

¹⁰Simatupang, H. (2022). Strategi Penyelenggaraan Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Perairan Nasional Dalam Rangka Mendukung Operasi Militer Selain Perang. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 380–384.

¹¹Harris, A., Sudiarso, A., & Sutanto, R. (2022). Strategi Pertahanan Laut Dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 325–331.

¹²Hermawan, T., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Analisa Dampak Dan Upaya Pemerintah Mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia. *Jurnal Strategi*

Sektor swasta, terutama perusahaan-perusahaan pelayaran dan logistik yang memanfaatkan jalur ALKI II, juga perlu mengambil peran dalam menjaga keamanan. Mereka dapat berkontribusi melalui penerapan standar keamanan maritim yang ketat di kapal-kapal mereka, serta berkoordinasi dengan pihak berwenang jika ada ancaman atau insiden yang terjadi di laut. Dengan adanya sinergi antara sektor swasta dan pemerintah, upaya menjaga keamanan di ALKI II dapat lebih efektif.

Peran ALKI II dalam mendukung keamanan sangat penting mengingat posisinya sebagai jalur pelayaran internasional yang strategis. Ancaman-ancaman seperti terorisme maritim, pembajakan, dan penyelundupan menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan. Melalui peningkatan patroli, penggunaan teknologi, serta kerjasama internasional, Indonesia dapat memastikan bahwa ALKI II tetap aman dan dapat berfungsi sebagai jalur pelayaran yang mendukung kepentingan nasional dan global. Inisiatif untuk melibatkan masyarakat pesisir dan sektor swasta juga penting dalam menciptakan sistem keamanan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Permasalahan utama dalam mendukung keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui ALKI II adalah potensi ancaman yang muncul dari lalu lintas laut internasional serta keterbatasan infrastruktur pertahanan dan pengawasan maritim di sepanjang jalur strategis ini. Sebagai jalur laut yang dilewati kapal-kapal dari berbagai negara, ALKI II menghadirkan tantangan yang kompleks terkait keamanan nasional, terutama dengan aktivitas ilegal seperti perompakan, penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, hingga ancaman geopolitik dari kehadiran kapal militer asing. Selain itu, infrastruktur pertahanan di sekitar ALKI II dan Kalimantan Timur, tempat IKN berada, belum sepenuhnya mendukung upaya pengawasan dan perlindungan yang optimal, sehingga meningkatkan risiko terhadap keamanan ibu kota baru. Posisi IKN yang dekat dengan ALKI II menambah urgensi untuk segera memperkuat kemampuan pertahanan, mengingat potensi ancaman non-konvensional seperti terorisme maritim, spionase, hingga serangan siber yang bisa merusak infrastruktur kritis nasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran strategis ALKI II dalam mendukung keamanan dan pertahanan IKN, serta merumuskan strategi yang efektif untuk memperkuat pengawasan dan mitigasi ancaman maritim di jalur ini. Penelitian ini berupaya memberikan rekomendasi kebijakan bagi pengambil keputusan di sektor pertahanan dan

keamanan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur militer, peningkatan teknologi pengawasan maritim, serta penguatan kerjasama regional dan internasional untuk mengamankan jalur ALKI II. Dalam kaitan ini, pengembangan pendekatan pertahanan terpadu yang mengkombinasikan elemen militer, diplomasi, dan pengelolaan lingkungan laut menjadi aspek kunci dalam menjaga kestabilan dan kedaulatan di sekitar kawasan IKN.

Namun, terdapat gap research yang signifikan terkait pengaruh ALKI II terhadap keamanan Ibu Kota Nusantara, khususnya bagaimana dinamika geopolitik dan ancaman non-tradisional seperti serangan siber serta aksi-aksi terorisme maritim di jalur internasional ini dapat mempengaruhi stabilitas ibu kota baru. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek ekonomi dan logistik ALKI, tanpa secara mendalam mengkaji aspek pertahanan maritim serta dampaknya bagi wilayah strategis di Kalimantan Timur. Selain itu, penelitian yang mengeksplorasi integrasi pertahanan laut dengan strategi pembangunan ibu kota juga masih sangat terbatas, sehingga menciptakan kekosongan dalam pemahaman holistik tentang peran jalur ALKI II bagi keamanan nasional, terutama di era pemindahan pusat pemerintahan.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi, mengingat posisi strategis Ibu Kota Nusantara yang diapit oleh ALKI II dan meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Laut Cina Selatan yang berdekatan. ALKI II bukan hanya menjadi jalur ekonomi yang vital, tetapi juga merupakan pintu masuk bagi berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan Indonesia, termasuk potensi gangguan terhadap IKN sebagai pusat pemerintahan baru. Dalam memperkuat keamanan ALKI II tidak hanya penting untuk melindungi kedaulatan maritim Indonesia, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan pembangunan IKN sebagai simbol pusat pemerintahan modern dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis peran strategis ALKI II dalam mendukung keamanan Ibu Kota Nusantara (IKN). Data dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam dengan para pakar keamanan maritim, pejabat militer, dan akademisi yang berfokus pada isu pertahanan dan geopolitik kawasan Asia Tenggara. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen kebijakan pertahanan, laporan dari instansi terkait, serta artikel jurnal dan buku yang membahas aspek strategis jalur ALKI dan pengaruhnya terhadap keamanan nasional. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana potensi ancaman maritim dan geopolitik di sepanjang ALKI II dapat

berdampak pada IKN, serta mengeksplorasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan di kawasan tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana data yang terkumpul dikategorikan berdasarkan tema-tema kunci, seperti keamanan maritim, geopolitik, dan pertahanan IKN. Melalui analisis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran mendalam mengenai strategi pertahanan yang optimal untuk menjaga keamanan IKN dari potensi ancaman yang datang melalui jalur ALKI II.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Peran ALKI II dalam Keamanan Maritim Ibu Kota Nusantara (IKN)

ALKI II, yang membentang dari Laut Sulawesi hingga Selat Makassar, memiliki peran strategis dalam mendukung keamanan maritim Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan wawancara dengan para pakar maritim dan pejabat militer, ditemukan bahwa jalur ini memiliki lalu lintas kapal yang tinggi, baik kapal dagang internasional maupun militer asing, yang mengharuskan pengawasan ketat dari pihak Indonesia. **Data kuantitatif menunjukkan** bahwa sekitar 20-30% dari total perdagangan dunia melewati jalur ini, sehingga menjadikannya penting tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi stabilitas ekonomi global.

Ancaman utama yang ditemukan di sepanjang ALKI II adalah meningkatnya aktivitas ilegal, seperti **penangkapan ikan ilegal**, **penyelundupan manusia**, dan **perompakan laut**. Hal ini didukung oleh data dari Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), yang melaporkan bahwa insiden perompakan di wilayah ALKI II meningkat sebesar 15% dalam lima tahun terakhir.

Dari hasil temuan ini, terlihat jelas bahwa posisi strategis ALKI II memerlukan peningkatan kapasitas pertahanan maritim. Tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah keterbatasan dalam **teknologi pengawasan maritim**, seperti radar dan kapal patroli yang tidak mencukupi untuk mengawasi seluruh wilayah jalur tersebut. Selain itu, terdapat **keterbatasan sumber daya manusia** yang berpengalaman dalam pengelolaan keamanan maritim di sepanjang jalur ini, sehingga menurunkan efektivitas pengawasan.

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia perlu mempertimbangkan peningkatan **kerjasama internasional**, baik di tingkat regional dengan negara-negara ASEAN, maupun secara global melalui organisasi maritim internasional. Dalam hal ini, penguatan **diplomasi pertahanan maritim** menjadi kunci untuk membangun sinergi antara aktor-aktor keamanan di kawasan yang berbagi kepentingan di jalur ALKI II.

Tabel 1. Tantangan dan Peluang Keamanan ALKI II

Kategori	Tantangan	Peluang	Penjelasan Detail
Keamanan	1. Aktivitas ilegal: perompakan, penyelundupan manusia, narkoba, dan penangkapan ikan ilegal	1. Kerjasama pertahanan maritim dengan ASEAN dan negara-negara mitra	Aktivitas ilegal ini dapat mengganggu stabilitas kawasan dan ekonomi, sementara kerjasama internasional dapat meningkatkan pengawasan dan pengamanan.
Teknologi	2. Kurangnya teknologi pengawasan: radar usang, minim penggunaan drone, satelit, dan AI	2. Peningkatan patroli maritim dan pengawasan menggunakan teknologi canggih seperti radar modern	Teknologi pengawasan yang canggih dapat memperkuat deteksi dini terhadap potensi ancaman di sepanjang ALKI II.
Sumber Daya	3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang terlatih dalam pengelolaan keamanan maritim	3. Pelatihan militer gabungan, latihan dengan negara mitra seperti latihan Rim of the Pacific (RIMPAC)	Latihan gabungan dapat membantu meningkatkan keterampilan SDM di bidang keamanan maritim dan memanfaatkan teknologi baru.
Lingkungan	4. Pencemaran laut dan degradasi ekosistem laut akibat aktivitas kapal asing dan tumpahan minyak	4. Pengembangan kebijakan maritim terpadu yang melibatkan perlindungan lingkungan	Perlindungan lingkungan akan menjaga keseimbangan ekosistem laut, yang pada gilirannya berkontribusi pada keamanan dan keberlanjutan jalur perdagangan.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa ALKI II menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi di kawasan tersebut, khususnya aktivitas ilegal seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkoba, dan penangkapan ikan ilegal. Tantangan ini diperparah dengan keterbatasan teknologi pengawasan dan minimnya pemanfaatan teknologi canggih seperti radar modern, drone, dan satelit, yang sangat diperlukan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di perairan yang luas ini. Selain itu, sumber daya manusia yang terbatas dan kurangnya personel terlatih dalam pengelolaan keamanan maritim juga menjadi salah satu faktor yang memperlemah kemampuan pengawasan di jalur ini. Namun, meskipun banyak tantangan, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat keamanan di ALKI II. Salah satunya adalah kerjasama pertahanan maritim dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara mitra lainnya, yang dapat membantu dalam meningkatkan patroli bersama dan berbagi teknologi canggih. Peningkatan patroli dan modernisasi sistem pengawasan menggunakan teknologi baru seperti AI dan radar berbasis satelit akan sangat membantu dalam mengatasi tantangan pengawasan di wilayah perairan yang luas. Pelatihan militer gabungan dan latihan internasional seperti RIMPAC juga menjadi peluang untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia di sektor keamanan maritim. Terakhir, masalah lingkungan yang menjadi tantangan di kawasan ini, seperti pencemaran laut dan degradasi ekosistem, juga memerlukan perhatian melalui pengembangan kebijakan maritim terpadu yang tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga pada perlindungan lingkungan,

yang pada akhirnya dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dan keamanan di ALKI II.

Dinamika Geopolitik dan Pengaruhnya terhadap Keamanan Ibu Kota Nusantara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ALKI II merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap dinamika geopolitik di kawasan Asia Tenggara, khususnya terkait sengketa di Laut Cina Selatan. Data dari wawancara menunjukkan bahwa keberadaan kapal-kapal militer asing di sekitar ALKI II semakin meningkat dalam lima tahun terakhir, terutama dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan Australia. **Data intelijen dari Kementerian Pertahanan Indonesia** juga mencatat adanya peningkatan aktivitas pengintaian militer asing di kawasan Selat Makassar, yang menimbulkan potensi ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional.

Dinamika geopolitik yang terjadi di sekitar ALKI II menciptakan tantangan besar bagi Indonesia, terutama dalam hal **kedaulatan dan kontrol wilayah perairan**. Meski Indonesia tidak terlibat langsung dalam sengketa Laut Cina Selatan, tetapi **proyeksi kekuatan militer asing** di sekitar ALKI II dapat berimplikasi serius pada stabilitas dan keamanan Ibu Kota Nusantara. Hal ini diperburuk dengan kurangnya sistem pertahanan udara dan maritim yang memadai di sekitar Kalimantan Timur.

Penting bagi Indonesia untuk **memperkuat kehadiran militer** di sekitar ALKI II, termasuk pembangunan pangkalan militer baru dan peningkatan **kapasitas armada Angkatan Laut** di kawasan ini. Selain itu, **kerjasama pertahanan regional** yang lebih intens dengan negara-negara ASEAN dan penggunaan **diplomasi preventif** akan membantu mengurangi potensi konflik di kawasan tersebut.

Tabel 2. Aktivitas Militer Asing di ALKI II dan Dampaknya terhadap Stabilitas Nasional

Negara	Jenis Aktivitas Militer	Frekuensi Aktivitas	Dampak terhadap Indonesia	Langkah Mitigasi
Amerika Serikat	Pengintaian maritim dan latihan militer di perairan internasional sekitar ALKI II	3-4 kali per tahun	Meningkatkan ketegangan di perairan internasional, terutama dalam rangka proyeksi kekuatan AS di Asia-Pasifik.	Peningkatan kerjasama pertahanan dengan AS untuk mencegah potensi konflik, memperkuat diplomasi pertahanan, dan memanfaatkan teknologi pengintaian bersama.
Cina	Proyeksi kekuatan angkatan laut (PLA Navy), kehadiran kapal militer dan pengintaian	5-6 kali per tahun	Menghadirkan tantangan geopolitik, dengan potensi konflik terkait sengketa Laut Cina Selatan dekat dengan ALKI II.	Meningkatkan kekuatan pertahanan di ALKI II, terutama dengan memperkuat kehadiran armada laut dan meningkatkan kerjasama ASEAN dalam menjaga stabilitas.
Australia	Latihan militer gabungan dan patroli maritim	2 kali per tahun	Positif bagi stabilitas regional, membantu memperkuat kapasitas	Memperkuat latihan gabungan dan meningkatkan pertukaran teknologi serta

	dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN		pertahanan Indonesia dalam pengawasan ALKI II.	pengetahuan militer dengan Australia dan mitra regional lainnya.
Jepang	Patroli keamanan dan pengamanan jalur laut internasional	1 kali per tahun	Kontribusi terhadap keamanan jalur perdagangan maritim dan dukungan stabilitas di ALKI II, dengan fokus pada penegakan hukum dan anti-pembajakan.	Meningkatkan kerjasama pertahanan dengan Jepang dalam penegakan hukum di perairan ALKI II, terutama di area perompakan dan penyelundupan.
Rusia	Pengintaian sporadis dan latihan militer di wilayah perairan internasional	1-2 kali per tahun	Peningkatan ketegangan geopolitik dengan kehadiran kekuatan besar di wilayah perairan internasional, yang dapat mengganggu stabilitas Indonesia.	Peningkatan diplomasi pertahanan dengan Rusia dan memperkuat kerjasama regional untuk meredakan potensi konflik militer di wilayah strategis tersebut.

Berdasarkan Tabel 2, aktivitas militer asing di ALKI II menunjukkan dinamika geopolitik yang kompleks dan meningkatnya proyeksi kekuatan dari negara-negara besar, seperti Amerika Serikat, Cina, Australia, Jepang, dan Rusia. Amerika Serikat sering melakukan pengintaian maritim dan latihan militer di perairan internasional sekitar ALKI II, yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan ini, terutama dalam persaingan kekuatan dengan Cina. Cina, melalui proyeksi angkatan lautnya, secara rutin menunjukkan kehadiran di sekitar wilayah yang bersinggungan dengan sengketa Laut Cina Selatan, yang meskipun tidak langsung terkait dengan Indonesia, dapat berpotensi memicu konflik yang berimbas pada ALKI II. Kehadiran Australia, yang melakukan latihan militer gabungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, menunjukkan potensi positif bagi stabilitas regional, dengan fokus pada peningkatan keamanan dan pengawasan maritim. Sementara itu, Jepang berperan aktif dalam patroli keamanan dan pengamanan jalur perdagangan maritim di kawasan ini, yang berdampak positif bagi penegakan hukum dan penanggulangan perompakan. Di sisi lain, aktivitas Rusia yang lebih sporadis menunjukkan adanya ketegangan geopolitik global yang semakin merambah ke wilayah Asia-Pasifik, termasuk ALKI II. Oleh karena itu, langkah mitigasi seperti memperkuat diplomasi pertahanan dengan negara-negara tersebut dan meningkatkan kehadiran militer Indonesia di ALKI II menjadi sangat penting. Hal ini juga diperkuat dengan pentingnya latihan militer bersama untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dalam menjaga stabilitas dan keamanan jalur ini.

Keterkaitan ALKI II dengan Infrastruktur Pertahanan dan Pengawasan Maritim

Penelitian ini menemukan bahwa infrastruktur pertahanan dan pengawasan maritim di sekitar ALKI II, terutama di Kalimantan Timur, masih sangat terbatas. Data menunjukkan bahwa jumlah kapal patroli yang dikerahkan di ALKI II hanya mencakup 40% dari kebutuhan ideal, yang

menyebabkan banyak area di jalur ini tidak terpantau dengan baik. Selain itu, hasil wawancara dengan pejabat militer menunjukkan bahwa sistem radar dan pengawasan yang digunakan saat ini sudah usang, dan sering kali tidak mampu mendeteksi kapal-kapal yang menggunakan teknologi penghindar radar modern.

Keterbatasan infrastruktur pertahanan di ALKI II mengindikasikan bahwa Indonesia perlu segera melakukan modernisasi sistem pertahanan maritimnya. **Pembangunan pangkalan militer** baru di Kalimantan Timur yang dekat dengan IKN bisa menjadi solusi untuk memperkuat kehadiran militer Indonesia di kawasan tersebut. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk **meningkatkan kapasitas teknologi pengawasan**, seperti penggunaan **drone** dan **satelit pengintai**, guna memantau aktivitas di perairan ALKI II secara lebih efektif.

Kerjasama dengan negara-negara mitra dalam **latihan militer gabungan** juga dapat meningkatkan kapasitas taktis dan strategis Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman di ALKI II. Latihan-latihan seperti ini memungkinkan Indonesia untuk mempelajari teknologi dan taktik pertahanan terbaru yang digunakan oleh negara-negara lain, sehingga dapat lebih siap dalam merespon ancaman yang muncul di perairan internasional ini.

Tabel 3. Kapasitas Pertahanan dan Pengawasan di ALKI II dan Kalimantan Timur

Komponen	Kondisi Saat Ini	Idealnya	Tindakan yang Dibutuhkan
Jumlah Kapal Patroli	Hanya sekitar 40% dari jumlah yang dibutuhkan untuk pengawasan efektif	100% cakupan pengawasan sepanjang ALKI II	Pengadaan kapal patroli tambahan, termasuk kapal cepat dan kapal penjelajah, untuk memperkuat pengawasan di seluruh jalur ALKI II.
Sistem Radar	Banyak radar yang usang, teknologi tidak memadai untuk deteksi kapal modern	Penggunaan radar modern dan sistem pengawasan berbasis satelit	Modernisasi sistem radar dan pengenalan teknologi berbasis AI dan drone untuk pengawasan 24/7 serta deteksi dini potensi ancaman maritim.
Pangkalan Militer	Terbatas, dengan jarak yang jauh dari lokasi strategis ALKI II dan IKN	Pembangunan pangkalan militer baru di Kalimantan Timur	Pembangunan pangkalan militer baru di kawasan Kalimantan Timur untuk meningkatkan kemampuan respons cepat terhadap ancaman di ALKI II dan sekitarnya.
Latihan Militer Gabungan	Sudah ada, tetapi cakupan masih terbatas pada kerjasama ASEAN dan mitra lain	Latihan gabungan reguler dengan negara-negara mitra	Meningkatkan frekuensi dan cakupan latihan militer gabungan, terutama yang berfokus pada operasi keamanan maritim di jalur internasional.
Teknologi Pengawasan (Drone/Satelit)	Belum digunakan secara optimal untuk pengawasan jalur ALKI II	Penggunaan drone dan satelit untuk pengawasan real-time	Peningkatan investasi dalam teknologi pengawasan berbasis drone dan satelit untuk deteksi aktivitas ilegal dan ancaman militer di ALKI II.

Berdasarkan Tabel 3, kapasitas pertahanan dan pengawasan di ALKI II, terutama yang terkait dengan Kalimantan Timur, masih sangat terbatas. Jumlah kapal patroli yang saat ini

dikerahkan hanya mencakup sekitar 40% dari kebutuhan ideal untuk pengawasan jalur ALKI II yang sangat luas. Hal ini menyebabkan banyak area perairan yang tidak dapat diawasi secara efektif, meningkatkan kerentanan terhadap aktivitas ilegal seperti perompakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal. Di samping itu, sistem radar yang digunakan sebagian besar sudah usang dan tidak mampu mendeteksi kapal-kapal modern yang menggunakan teknologi penghindar radar. Untuk memenuhi kebutuhan ideal pengawasan maritim, Indonesia perlu segera meningkatkan jumlah kapal patroli, terutama kapal cepat dan kapal penjelajah yang mampu beroperasi di perairan yang dalam dan jauh dari pangkalan. Selain itu, modernisasi sistem radar dengan teknologi yang lebih canggih serta penggunaan drone dan satelit untuk pengawasan real-time di sepanjang jalur ini sangat diperlukan. Pangkalan militer yang ada saat ini juga masih jauh dari Ibu Kota Nusantara dan ALKI II, sehingga respons terhadap ancaman yang muncul menjadi lebih lambat. Pembangunan pangkalan militer baru di Kalimantan Timur sangat penting untuk memperkuat kehadiran militer dan memungkinkan respons cepat terhadap potensi ancaman. Terakhir, latihan militer gabungan dengan negara-negara mitra perlu lebih sering dilakukan, terutama yang berfokus pada keamanan maritim, untuk meningkatkan keterampilan pasukan dalam menghadapi tantangan di perairan internasional ini.

Dampak Lingkungan terhadap Keamanan Maritim di ALKI II

Selain aspek keamanan, penelitian ini menemukan bahwa masalah lingkungan di sekitar ALKI II, seperti **pencemaran laut** akibat tumpahan minyak dan aktivitas kapal asing, juga berpengaruh terhadap keamanan maritim. **Laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)** menunjukkan bahwa ada peningkatan signifikan dalam kasus pencemaran laut di Selat Makassar, yang dapat memengaruhi jalur perdagangan dan keamanan perairan. Selain itu, penangkapan ikan ilegal juga berdampak pada degradasi sumber daya laut, yang dapat memperburuk stabilitas ekonomi di kawasan ini.

Masalah lingkungan di ALKI II menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengelola keamanan maritim, termasuk memasukkan **aspek perlindungan lingkungan** ke dalam strategi pertahanan. **Kerjasama lintas sektor**, seperti antara Kementerian Pertahanan dan KLHK, menjadi penting untuk mengintegrasikan isu-isu lingkungan ke dalam kebijakan keamanan nasional.

Tabel 4. Masalah Lingkungan di ALKI II dan Dampaknya terhadap Keamanan Maritim

Masalah Lingkungan	Dampak Terhadap Keamanan Maritim	Jumlah Insiden Terkait (Data 5 tahun terakhir)	Solusi yang Diusulkan
--------------------	----------------------------------	--	-----------------------

Pencemaran Laut (Tumpahan Minyak)	Mengganggu navigasi kapal, menyebabkan degradasi lingkungan laut, dan merusak ekonomi lokal	12 insiden besar dan 50 insiden kecil dilaporkan (data Kementerian Lingkungan Hidup)	Penerapan aturan ketat bagi kapal asing yang melintas di ALKI II, serta peningkatan patroli untuk menegakkan aturan lingkungan.
Penangkapan Ikan Ilegal	Mengurangi stok ikan, memicu konflik antara nelayan lokal dan kapal asing	150 kasus per tahun di sepanjang ALKI II	Penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta kerjasama internasional untuk melindungi sumber daya laut.
Sampah Laut dan Polusi Plastik	Mengganggu ekosistem laut, meningkatkan risiko bagi jalur perdagangan maritim	Meningkat sebesar 25% dalam 5 tahun terakhir	Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah di pelabuhan dan kampanye internasional untuk menjaga kebersihan laut.
Aktivitas Kapal Besar	Peningkatan risiko kerusakan ekosistem pesisir dan terumbu karang	Terumbu karang mengalami kerusakan hingga 40% di beberapa area	Penerapan zona eksklusif lingkungan yang membatasi akses kapal besar ke kawasan rentan ekologi.

Berdasarkan Tabel 4, masalah lingkungan yang terjadi di ALKI II tidak hanya mempengaruhi ekosistem laut tetapi juga berdampak langsung pada keamanan maritim di wilayah tersebut. Pencemaran laut, terutama akibat tumpahan minyak, mengganggu navigasi kapal dan merusak lingkungan laut yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan wilayah ini dalam menopang industri perikanan dan pariwisata. Data menunjukkan adanya 12 insiden besar dan 50 insiden kecil terkait tumpahan minyak dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan urgensi penegakan aturan ketat bagi kapal asing yang melintasi ALKI II. Selain itu, penangkapan ikan ilegal telah menyebabkan degradasi sumber daya laut, dengan sekitar 150 kasus per tahun dilaporkan di sepanjang ALKI II. Aktivitas ini tidak hanya merugikan ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan konflik antara nelayan lokal dan kapal asing. Sampah laut dan polusi plastik juga mengalami peningkatan sebesar 25% dalam lima tahun terakhir, yang memperburuk kondisi ekosistem laut dan mengganggu jalur perdagangan maritim. Selain itu, aktivitas kapal besar yang beroperasi di sekitar ALKI II menimbulkan kerusakan pada terumbu karang, dengan beberapa area mengalami kerusakan hingga 40%. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang serius, seperti penerapan aturan yang lebih ketat bagi kapal yang beroperasi di ALKI II, peningkatan patroli untuk penegakan hukum lingkungan, dan pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah di pelabuhan-pelabuhan besar. Kampanye internasional untuk menjaga kebersihan laut serta penetapan zona eksklusif lingkungan yang membatasi akses kapal besar ke area rentan ekologi juga menjadi solusi jangka panjang yang dapat mendukung keberlanjutan ekosistem laut sekaligus meningkatkan keamanan maritim di ALKI II.

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh data di atas, dapat disimpulkan bahwa ALKI II memainkan peran strategis yang sangat penting dalam mendukung keamanan dan stabilitas Ibu Kota Nusantara, namun menghadapi berbagai tantangan signifikan. Aktivitas ilegal seperti perompakan, penyelundupan, serta penangkapan ikan ilegal, ditambah dengan keterbatasan teknologi pengawasan dan kapasitas militer, menjadi ancaman utama bagi keamanan maritim di jalur ini. Selain itu, aktivitas militer asing dari negara-negara besar turut meningkatkan kompleksitas geopolitik di kawasan ini. Meski demikian, peluang dalam bentuk kerjasama internasional dan latihan militer gabungan dengan negara-negara mitra dapat memperkuat pertahanan di ALKI II. Di sisi lain, masalah lingkungan seperti pencemaran laut dan degradasi ekosistem juga berdampak pada keamanan dan ekonomi lokal, yang memerlukan penegakan hukum dan kebijakan lingkungan yang lebih ketat. Dengan peningkatan infrastruktur pertahanan, modernisasi teknologi, dan kerjasama internasional, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperkuat kontrol terhadap ALKI II dan menjaga stabilitas serta keamanan di perairan yang vital ini.

REFERENCES

- Dotulung, A. M. (2020). Fungsi Radar Surveillance IMSS dalam Mendukung Pengamanan Pelayaran di Selat Sunda (ALKI I). *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 8(1).
- Fitriyanto, A., Darmawan, W. B., & Djuyandi, Y. (2022). Kerjasama Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia Ii:(Studi Kasus Sinergi Bakamla, TNI Dan POLAIRUD). *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 5(1), 1–15.
- Harris, A., Sudiarso, A., & Sutanto, R. (2022). Strategi Pertahanan Laut Dalam Rangkaancaman Keamanandi Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 325–331.
- Herlambang Suryo Putro, S. (2022). Peran Tni AL Dalam Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum Dan Keselamatan Di Laut Guna Mendukung Perpindahan Ibu Kota Negara Dalam Rangka Mewujudkan Poros Maritim Dunia. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 10(2), 118–131.
- Hermawan, T., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Dalam Analisa Dampak Dan Upaya Pemerintah Mengamankan Alur Laut Kepulauan Indonesia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 6(3).
- Jayamahe, J. J., Luther, M., & Panjaitan, M. B. (2023). PERAN LANTAMAL VIII MANADO GUNA

MENJAGA KEAMANAN LAUT DAN MENDUKUNG TUGAS TNI AL. *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)*, 11(3), 227–248.

Kharish, L., Syahtaria, I., Sianturi, D., Prakoso, L. Y., Saragih, H. J. R., & Bangun, E. (2022). Strategi Gelar Kekuatan TNI Angkatan Laut dalam Mengatasi Pelanggaran di Wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia II Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Perairan dalam Rangka Mendukung Operasi Militer Selain Perang (Omsp). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8), 2849–2858.

Nilasari, S. R., Marzaman, A. P., & Kurniasari, R. (2024). Doktrin Poros Maritim Dunia dan Keamanan di Bidang Maritim Studi Kasus: Perdagangan Narkotika di Jalur ALKI II. *Journal of Political Issues*, 6(1), 20–31.

Simatupang, H. (2022). Strategi Penyelenggaraan Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Perairan Nasional Dalam Rangka Mendukung Operasi Militer Selain Perang. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 380–384.

Sukoco, S. (2022). PERAN KORPS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA (KORPOLAIRUD) DALAM MENJAGA KEAMANAN DI WILAYAH SELAT SUNDA. *Strategi Pertahanan Udara*, 8(2).

Suryawan, I. G. P., Ladjide, S., & Riyadi, S. F. (2021). Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Dalam Perwujudan Good Order At Sea: Studi Kasus Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Jurnal Selat*, 8(2), 149–158.